

# AKSELERASI EKONOMI GLOBAL DI BUMI INDONESIA DALAM SEKITAR REFORMASI

**Sulaeman**

Prodi Pendidikan Sejarah FKIP – UHAMKA

**Abstrak.** Penyebaran globalisasi tentu berbeda dari segi intensitas dan cakupannya. Proses tersebut telah menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan melainkan juga telah memasuki ketataran *systems, processes, actors*, dan *events*. biaya sosial dan politik yang terjadi akibat terbukanya pasar barang dan pasar finansial menjadi tantangan bagi negara-negara berkembang. Liberalisme sangat memperlemah posisi pekerja dan serikat pekerja. Di lain pihak, tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labor*) tidak bebas berpindah ke negara-negara yang tingkat upah rata-ratanya lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa liberalisasi yang terjadi lebih bersifat kearah yang merugikan kepentingan negara-negara berkembang.

**Kata-kata kunci:** Ekonomi, Globalisasi, dan Perubahan Sosial

**Abstract.** *The spread of globalization is absolutely different in terms of the intensity and the scope. The process has affected not only the all aspects of life but also the sphere systems, processes, actors, and other great events. In addition, the social and political costs of the open society for goods and financial markets are the other challenge for the developing countries. The liberalization weakens increasingly the position of workers and the trade unions. On the other hand, unskilled labours are not free to move to countries that the average wage level is higher. To short, liberalization is detrimental to the interests of developing countries.*

**Keywords:** *Economy, Globalization, Social Change*

Gagasan tentang “ekonomi” memiliki sejarah panjang dalam pemikiran manusia. Perjalanan ini telah memberikan sejumlah ketidak-jelasan terhadap gagasan tersebut yang dihasilkan oleh berbagai makna dan di terapkan tentang penggabungan sisi ilmiah serta doktrin dari makna ekonomi itu sendiri. Hal ini telah dikemukakan dalam beberapa isu yang penting dan terhadap isu mana analisa ekonomi diharapkan akan memberikan penjelasan. Salah satu cara mem-batasi ruang lingkup ilmu ekonomi dengan mengatakan, bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang berhubungan dengan persoalan-persoalan kehidupan manusia. Bahkan, definisi tersebut telah diungkapkan oleh Alfred Marshall (dalam Lipsey & Steiner, 1991:9) bahwa:

Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang manusia dalam urusan hidup yang biasa. Karena persoalan ekonomi mempunyai segi yang sama, seorang dapat dengan mem-perhatikannya, sampai pada definisi yang lebih sesuai.

Berdasarkan definisi tersebut, pada hakikatnya kajian tentang ekonomi dalam kehidupan manusia merupakan hal-hal yang biasa saja, maksudnya ialah semua orang sama-sama ingin memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya supaya tetap bertahan hidup. Tetapi, setiap orang pasti memiliki cara-cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika landasan berpikir manusia seperti itu mengenai cara atau proses pemenuhan kebutuhan yang berbeda dari setiap individu, tentu saja hal ini terjadi

juga diberbagai negara di dunia ini. Misalnya, kemunculan paham sosialisme, komunisme dan liberalisme merupakan fakta dari perbedaan penerapan perekonomian masing-masing negara.

Setidaknya, pada akhir dekade 1980-an dan pada awal dasawarsa 1990-an, banyak negara wilayah Asia dan Eropa Timur melakukan transisi ekonomi akibat desakan-desakan internal dan eksternal yang tidak terhindarkan. Negara-negara di Asia yang mengalami transisi tersebut antara lain, RRC (Republik Rakyat Cina), Laos, Vietnam, Myanmar, dan Mongolia. Sedangkan wilayah Eropa Timur negara-negara tersebut meliputi Polandia, Cekoslovakia, Hongaria, termasuk Rusia. Secara bersama-sama negara tersebut melakukan transisi ekonomi dengan cara dan perspektif masing-masing. Menariknya, terdapat strategi dan hasil yang berlainan antara yang terjadi di Asia dan Eropa Timur. Sebab “Pendekatan Asia” berbeda dengan “Pendekatan Eropa Timur” dan hasilnya cukup menarik sebagai masukan bagi reformasi ekonomi Indonesia (Yustika, 2006:5).

Pendekatan Ekonomi Asia yang cenderung mendesain transisi ekonominya melalui tahapan yang berurutan. Pendekatan ini juga lebih menitikberatkan kepada strategi “*bottom-up*” serta menempatkan reformasi pada level mikro ekonomi, seperti reformasi kelembagaan (reformasi di sektor pertanian dan reformasi usaha-usaha industri) dan reformasi harga serta mendahului reformasi pada level makro ekonomi (kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi perdagangan luar negeri). Sebaliknya, “Pendekatan Eropa Timur” cenderung mengerjakan reformasi ekonominya lewat perubahan yang radikal (*big-bang approach*), seperti tampak dalam perubahan hak kepemilikan, penghapusan kontrol bangsa, serta liberalisasi nilai tukar dan perdagangan. Singkatnya, tujuan dasar dari reformasi

tersentralisasi menuju sistem ekonomi pasar bebas secara cepat (Yustika, 2006:6).

Jika dibandingkan dengan konteks ekonomi Indonesia, format pembangunan yang dilakukan sejak awal Pasca Kemerdekaan tahun 1945, memang telah di skenariokan untuk meletakan bidang ekonomi sebagai prioritas yang harus tercapai sehingga bidang lain (politik) harus diamankan dan diposisikan sebagai pendukung bagi upaya tersebut. Konsekuensinya, paradigma “stabilitas politik” menjadi sumber utama dari pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi. Ini berarti seluruh potensi konflik dibidang politik yang mungkin akan muncul harus ditanggulangi sejak dini, karena konflik tersebut mencuat maka target pembangunan ekonomi bisa meleset. Dengan jaminan stabilitas politik seperti itulah, kerangka umum pembangunan ekonomi domestik secara teratur dan terorganisasi bisa dirancang dan dijalankan.

### **Pancasila Sebagai Landasan Ekonomi Indonesia**

Sejarah sistem ekonomi Pancasila sebenarnya adalah sejarah Republik Indonesia. Maksudnya ialah umurnya sama dengan Republik ini, karena lahir dalam jantung bangsa melalui Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 beserta tafsirannya. Oleh karena itu, sistem ekonomi Pancasila bersumber langsung dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan amanat pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 UUD 1945. Khusus dalam hal ekonomi diperjelas lagi pasal 27 ayat 2 berbunyi; tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan pasal 33 berbunyi; 1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3) Bumi,

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Sedangkan pasal 34 berbunyi: *fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.*

Dalam penjelasan dari pasal 33 mengenai kesejahteraan sosial lebih jauh bahwa:

Demokrasi ekonomi adalah produksi yang dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan anggota-anggota masyarakat. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluarga-an. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Dengan landasan konsepsional tersebut maka sistem ekonomi Pancasila berada pada tiga level sekaligus, yaitu ontologis, epistemologis dan aksiologis. Keberadaan sistem Ekonomi Pancasila sudah ada dengan Pancasila sebagai landasan idealnya dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Keduanya lebih lanjut dijabarkan dalam Tap MPR/S (GBHN), Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. GBHN sendiri merupakan arah dan kebijakan negara dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi. GBHN juga merupakan hasil perencanaan nasional yang disusun oleh pemerintah dan dibahas serta disahkan dalam sidang umum MPR. Pada level Tap MPR tentang GBHN dapat kita lacak dari ketetapan No. XXIII/MPRS/1966. Inti dari ketetapan ini adalah kalimat yang berbunyi, “sistem ekonomi dipimpin berdasarkan Pancasila sebagai jaminan berlangsungnya demokrasi ekonomi. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan...”

Intinya, dalam keseluruhan GBHN 1973-1998, pembangunan ekonomi nasional adalah *pertama*, keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai

pengamalan dari semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dikaitkan dengan pemerataan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

*Kedua*, pembangunan nasional di laksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Selanjutnya untuk memahami keberadaan sistem ekonomi Pancasila dapat dipahami dengan menilik dari ciri pokoknya. Tetapi, ciri pokok ini masih menjadi perdebatan yang panjang diantara para ilmuwan. Perdebatan dan pendekatan pemahaman sistem ekonomi Pancasila mulai muncul dari berbagai disiplin ilmu. Misalnya, sosiologi, antropologi, sejarah, filsafat, hukum dan studi tata peran pelaku ekonomi. Selanjutnya, penjelasan sekaligus perdebatan ciri tersebut dapat dikaji melalui paparan tulisan Emil Salim dan Mubyarto.

Menurut Emil Salim (1979:13), ciri sistem ekonomi Pancasila hanya empat. *Pertama*, adanya demokrasi ekonomi; produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dan di bawah pimpinan atau penilikan anggota. *Kedua*, ciri kerakyatan; memperhatikan penderitaan rakyat. *Ketiga*, kemanusiaan; tidak memberi toleransi pada eksploitasi manusia. *Keempat*, religius, menerima nilai-nilai agama dalam hidupnya.

Sedangkan menurut Mubyarto (1987: 147), ekonomi Pancasila memiliki lima ciri. *Pertama*, adanya rangsangan ekonomi, moral dan sosial. *Kedua*, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan

kemerataan sosial sesuai asas kemanusiaan. *Ketiga*, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh dan nasionalisme. *Keempat*, koperasi merupakan *soko guru* perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama. *Kelima*, adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan ditingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial. Sehingga, dari berbagai uraian tentang ciri dan sistem ekonomi Pancasila tersebut, penulis berpendapat bahwa sebagian ciri ini telah ada dalam GBHN dan dilaksanakan oleh Pemerintah Orde Baru. Keterkaitannya dengan pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila, menarik untuk mengkaji pendapat Peter McCawley (1982:108), bahwa perdebatan konsep sistem ekonomi Pancasila akan lebih produktif dan efisien apabila sistem ekonomi Pancasila benar-benar bisa diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah kongkrit yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia.

Selanjutnya, dalam mengatasi persoalan utama bangsa pada awal Orde Baru seperti kelangkaan pangan, pengangguran dan kemiskinan, pemerintah Orde Baru melalui GBHN sebagai pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila telah menetapkan pembangunan sektor pertanian pangan, terutama beras sebagai prioritas pembangunan. Pembangunan sektor pangan ini disebut juga *program revolusi hijau*. Mengapa komoditi beras menjadi diutamakan? *Pertama*, karena sebagian besar rakyat miskin di Indonesia bekerja di sektor pertanian, khususnya beras. *Kedua*, beras adalah hajat hidup sebagian besar masyarakat. *Ketiga*, harga beras saat itu tidak stabil dan tinggi karena kelangkaan suplai dalam negeri akibat produksi yang sangat rendah. Oleh karena itu, dibuatlah satu program peningkatan produksi agar tercapai swasembada beras, kestabilan harga, dan

pada gilirannya peningkatan dan pendapatan kesejahteraan petani.

Melalui program tersebut tetap di gunakan mekanisme pasar untuk menetapkan harga beras yang stabil yang dapat memberikan insentif sebagai peningkatan produksi di satu pihak, di lain pihak harga tersebut tetap terjangkau oleh daya beli sebagian besar konsumen rakyat banyak. Untuk menangani pemasaran beras, pemerintah menugaskan Bulog agar menjaga stabilitas harga dengan mendapatkan fasilitas kredit lunak dari Bank Indonesia dan kewenangan monopoli impor beras.

Kegiatan perekonomian lainnya untuk mengatasi kelangkaan pangan dan kemiskinan, dijumpai juga implementasi sistem ekonomi Pancasila, yaitu program peningkatan produksi susu sapi untuk mengurangi impor susu yang sangat besar sekali. Walaupun berbeda dengan kasus beras, karena pasar susu sapi sangat terbatas, terutama pada industri pengolahan susu. Mengenai pasar susu ini, penentuan harga dalam perdagangan susu sapi lebih banyak ditetapkan oleh rasio susu impor dan susu lokal. Disamping itu juga dengan berlandaskan konsensus dalam kemitraan antara koperasi susu dengan perusahaan industri pengolahan susu tersebut. Untuk kepastian pelaksanaannya maka konsensus tentang harga tersebut diatur melalui Menteri Perdagangan.

Program ini merupakan *revolusi putih* di pedesaan yang berhasil meningkatkan jumlah kepemilikan sapi oleh peternak pada tahun 1979, dari 6.780 peternak memiliki 38.185 ekor menjadi 74.000 peternak yang memiliki 250.000 ekor tahun 1989. Mereka menghasilkan produksi susu tahun 1979 sebesar 10.3 juta liter menjadi 250 juta liter pada tahun 1989. Harga susu dipeternak dari Rp. 180 pada tahun 1979 menjadi Rp. 400 tahun 1989. Rasio susu dalam negeri di banding impor pada 1979 sebesar 1:10 menjadi 1,1:07 di tahun 1989. Penghematan devisa \$2,3 juta pada tahun 1979 menjadi

\$150 juta pada tahun 1989 (Lembaga Manajemen FE-UI, 1990:121).

Melihat praktek ekonomi seperti diuraikan di atas dan menjawab hipotesa McCawley diatas dapat disimpulkan bahwa menurut penulis, sistem ekonomi Pancasila telah berhasil dilaksanakan. Karena, pola pelaksanaan dan peran pelaku-pelakunya sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas. Walaupun pelaksanaannya masih ada eksese-eksese sehingga hasilnya belum sampai pada bentuknya yang ideal.

Namun, berbagai pencapaian prestasi tersebut tidak dapat dipertahankan akibat krisis ekonomi dan tidak digunakannya sistem ekonomi Pancasila dalam pengelolaan ekonomi nasional. Persoalan berikutnya, bagaimanakah keberhasilan sistem ekonomi Pancasila dapat diwujudkan kembali ditengah pusaran globalisasi yang menganut pasar bebas di era modern saat ini?

### **Kutub Ekonomi Dunia**

Di bidang ekonomi internasional, negara-negara kuat seperti Amerika Serikat, Jerman (bersatu 3 Oktober 1990) dan Jepang adalah tiga kutub utama ekonomi dunia. Sekitar 70% dari sumber ilmu dan pengetahuan, keterampilan, permodalan dan pengelolaan kebutuhan pokok manusia seperti pangan, energi, transportasi dan pemasaran dikuasai oleh perusahaan atau negara Amerika Utara (AS, Kanada, Meksiko), Masyarakat Ekonomi Eropa (dibawah pimpinan Jerman), dan Jepang. Di bidang penelitian dan pengembangan, ketiga kutub ekonomi dunia itu menghasilkan lebih dari 76% penelitian dasar serta sekitar 65% penelitian terapan. Kalangan elit strategis seperti manajer, akuntan, ahli hukum, insinyur, ahli komputer, kalangan profesional tingkat tinggi maupun menengah menguasai bank data, sistem pengolahan dan penyimpanan data ilmu dan pengetahuan (Sudarsono, 1995:191).

Ruang gerak, pilihan arah dan kecepatan pembangunan bangsa-bangsa sedang berkembang seringkali lebih banyak ditentukan oleh tersedia atau tidaknya faktor-faktor seperti dana, investasi, ahli teknologi dan ahli pengetahuan. Semua ini, sebagaimana diketahui, adalah faktor-faktor yang dihibahkan atau “dipinjamkan” negara-negara maju ke pada bangsa-bangsa sedang berkembang. Atas dasar itu, muncul ungkapan-ungkapan seperti “dunia tanpa tapal batas”.

Adapun, *Bauman* (dalam (Ritzer, 2010:639) melihat globalisasi sebagai “Perang Luar Angkasa”. Menurut pandangannya, “mobilitas menjadi faktor stratifikasi yang cukup kuat dan sangat didambakan di dunia saat ini”. Jadi, para pemenangnya adalah mereka yang *mobile*. Pada intinya dalam ekonomi global seperti sekarang ini, pendidikan dan manajemen semakin mengakibatkan kelipatan pentingnya jasa dan informasi sebagai penggerak ekonomi dunia.

### **Perbankan dan Dunia Usaha Indonesia**

Krisis berkepanjangan di Indonesia yang bermula dari krisis moneter tahun 1997, seringkali dinyatakan sebagai akibat dari berlangsungnya globalisasi. Presiden Soeharto sendiri ketika itu beberapa kali menyatakan bahwa demikianlah yang terjadi, bahwa Indonesia menjadi “korban” dari deru globalisasi yang melanda seluruh dunia. Untuk itu, perlu menyimak apa sebenarnya yang dimaksud dengan globalisasi, dan sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

Ada dua pilar utama yang menopang sistem kapitalisme modern, yaitu *pasar uang* (sistem perbankan) dan *pasar modal*. Kedua pilar inilah yang memungkinkan terjadinya proses akumulasi modal yang sangat pesat. Sedemikian pesatnya, sehingga kian tidak berkaitan langsung dengan perkembangan sektor real.

Ekonomi pasar cenderung untuk mengawasi produksi dan distribusi demi kepentingan umum, masalahnya ialah apakah ekonomi “terencana” dapat melaksanakannya lebih baik, sebagai alternatif maupun pelengkap. Pendukung *laissez faire* (pasar bebas) yang paling gigih pun tidak akan menyatakan tidak perlunya negara, ada fungsi-fungsi yang paling minimum yang mutlak harus dilaksanakan oleh negara. Adam Smith (dalam Lewis, 1980:9-10) menyatakan pertahanan, peradilan, pendidikan dan jalan-jalan serta komunikasi sebagai fungsi yang minimum itu. Dibawah sistem *laissez faire* pendapatan tidak terbagi secara adil. Sebagai kelanjutan dari keadaan ini, barang-barang yang kurang mendesak dihasilkan juga untuk orang-orang kaya, sedangkan rakyat miskin masih membutuhkan pendidikan, perawatan kesehatan, makanan yang bergizi, perumahan yang layak dan kesenangan-kesenangan mendasar.

Peningkatan kesejahteraan yang bersumber dari aktivitas di kedua pasar ini kian artifisial (sempit). Oleh karena itu, mengakibatkan kerentanan dalam perekonomian khususnya dan kehidupan umat manusia umumnya. Hal ini disebabkan oleh pola eksploitasi yang telah melampaui batas-batas negara sebagai konsekuensi dari gelombang globalisasi (Basri, 2002:192-193).

Globalisasi itu sendiri bukanlah suatu fenomena baru dalam sejarah peradaban dunia. Sebelum kemunculan negara-bangsa (*nation-state*), perdagangan dan migrasi lintas Benua telah sejak lama berlangsung. Jauh sebelumnya perdagangan regional telah membuat interaksi antar suku bangsa terjadi secara ilmiah. Sejak masa sejarah modern, khususnya sebelum memasuki abad 20, globalisasi dipandang sebagai gelombang masa depan. Dua dekade sebelum Perang Dunia I, arus uang internasional telah merekatkan Eropa lebih erat dengan Amerika Serikat, Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Namun, sejalan dengan siklus ekonomi dan

politik dunia, gelombang globalisasi juga mengalami pasang surut. Salah satu kekuatan yang melatarbelakanginya adalah tarik-menarik antara paham internasionalis dengan nasionalis atau isolasionis (Basri, 2002:193).

Gelombang globalisasi yang melanda seantero dunia sejak dekade 1980-an jauh berbeda dari segi intensitas dan cakupannya. Proses tersebut seperti yang sekarang kita saksikan akibat dari globalisasi dewasa ini praktis telah menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan, yang tidak saja disegala bidang (ekonomi, sosial, budaya, politik dan ideologi), melainkan juga telah memasuki ketataran *systems, processes, actors, dan events*.

Globalisasi tidak bisa digeneralisasikan sebagai fenomena yang memiliki sisi baik bagi segala aspek kehidupan. Globalisasi tidak berlaku bagi segalanya. Sehingga, globalisasi selalu menyangkut ekspansi kekayaan (*wealth*), bukan mengalokasikannya. Persoalan besar lain yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan dunia internasional untuk meliberalisasikan perekonomiannya adalah biaya sosial dan politik yang terjadi akibat terbukanya pasar barang dan pasar finansial. Liberalisasi barang, jasa, serta modal membuat posisi pekerja dan serikat pekerja kian melemah. Di lain pihak, tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labor*) tidak bebas berpindah ke negara-negara yang tingkat upah rata-ratanya lebih tinggi. Jadi, liberalisasi yang terjadi lebih bersifat kearah yang merugikan kepentingan negara-negara berkembang (Basri, 2002:196).

### **Globalisasi: Strategi Baru Penjajahan Dunia**

Kehidupan umat manusia di dunia ini, dapat dikatakan seperti panggung dengan lakon diatas sandiwara yang telah diskenario-kan. Jika panggung sebagai simbolisasi suatu negara (*state*), maka lakonnya adalah rakyat.

Lalu siapakah yang membuat skenario jika kedua unsur tersebut sudah diketahui? Tentu yang merencanakan dan mendesain jalannya sandiwara ialah orang-orang yang berkuasa secara materialis ataupun sains. Mengapa demikian? Dalam hal ini hanya para penguasalah yang pantas hadir di balik layar (*behind the scene*), dasar asumsi yang menjadi pedoman adalah mereka memiliki berbagai macam strategi dan taktik untuk terus bertahan memenuhi hasrat refilnya.

Bagaimana para penguasa menuangkan pemikirannya di atas panggung sandiwara kehidupan dunia? Apakah ukuran untuk para penguasa itu? Berdomisili di negara-negara adidaya kah? Atau mereka seperti bunglon yang bisa menyamar di mana pun tanpa kecurigaan masyarakat terhadapnya?

### **Suatu Refleksi Historis**

Perlu di ketahui bahwa dahulu penjajahan di dunia hanya melakukan 2 strategi, yaitu (1) imperialisme kuno adalah penjajahan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dan kejam diterapkan oleh Belanda yang telah menjajah bangsa Indonesia, (2) imperilisme modern, yaitu penjajahan yang lebih terstruktur dengan pengembangan sumber daya manusia yang terjajah sebagai objek pemasaran barang-barang negeri penjajah hal ini dilakukan oleh Inggris.

Perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia ini penuh dengan kesengsaraan, kepahitan, dan penindasan, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Tetapi, terdapat kekeliruan terhadap penafsiran sejarah penjajahan bangsa Indonesia (dahulu nusantara), bahwa bangsa kita telah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sangat keliru. Kiranya per-bendaharaan tahun tersebut harus di klarifikasi. Mengapa demikian? Karena *time line* yang tercatat secara garis besar pada tahun 1596 Cornelis de Houtman memulai ekspedisi Belanda tiba di Banten, belum ada

penyiksaan terhadap rakyat pribumi dan tidak ada eksploitasi sumber daya alam. Kemudian 6 tahun berselang, tepatnya tahun 1602 VOC didirikan oleh penguasa-penguasa Belanda. Adapun agenda VOC, seperti memperkenalkan tanaman tebu dan menanam untuk pertama kalinya di Banten (1629), mengembangkan industri percetakan di Jawa (1668), memperkenalkan penanaman kopi arabika di Jawa (1669). Hingga tahun 1779 VOC mengalami kebangkrutan dan bubar akibat korupsi dan salah urus. Dan penjajahan di Indonesia, baru dimulai pada tahun 1808 ketika Deandles membangun jalan raya pos Anyer-Panarukan melalui kerja paksa yang sangat menyengsarakan rakyat Jawa (Adams, 2007:382-385).

Penjajahan telah menyengsarakan rakyat pribumi, sekaligus menjadi titik kebangkitan nasionalisme bangsa Indonesia. Biarlah sejarah kelam itu mengisi ingatan kolektif bangsa, tetapi jangan pernah melupakannya sebagai proses pembelajaran dan pemaknaan kehidupan karena pada hakikatnya hanya bangsa yang lemah yang akan selalu terjajah.

### **Bagaimana Penjajahan Saat ini?**

Bangsa Indonesia sudah terlepas dari belenggu kolonialisme dan imperialisme barat, dan menyatakan status negara yang merdeka ditandai pembacaan proklamasi oleh Soekarno didampingi Moh. Hatta, tanggal 17 Agustus 1945. Kini bangsa kita menuju era globalisasi. Suatu zaman yang meliputi berbagai macam kecanggihan teknologi, telekomunikasi dan transportasi sehingga memudahkan setiap individu ataupun kelompok bergerak bebas, Kenichi Ohmae menyebutnya sebagai zaman yang menjadikan *negara-negara tanpa tapal batas*.

Globalisasi memudahkan para pemilik modal menguasai suatu daerah dengan sumber daya alam yang melimpah, sebut saja PT. Freeport di Papua, Newmount di

Sulawesi, Exon Mobile di Kalimantan, dan diberbagai daerah lainnya. Tidak perlu bangga dengan hadirnya perusahaan asing seperti itu, memang disatu sisi sebagai penghasil pajak terbesar, tetapi bagaimana kondisi masyarakat sekitar? Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup sengsara dan mengalami gizi buruk, busung lapar, serta penderitaan berbagai macam penyakit karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa pangan dan sandang. Hal demikian memberikan indikasi bahwa, kemerdekaan hanya sebatas mimpi saja dan lebih tepat seperti *mercusuar* yang cahaya terangnya bersinar diatas menara tetapi dibawahnya gelap gulita.

Bukankah penjajahan era kolonialisme dan imperialisme masih dilakukan terhadap negara-negara yang sudah merdeka? Suka ataupun tidak, sesungguhnya demikian. Hanya saja, terdapat pembaharuan terhadap strategi yang diterapkan oleh para penguasa dan pemilik modal (*capital*), yaitu dengan menggabungkan strategi imperialisme kuno dan imperialisme modern yang dibungkus dan diperindah bentuknya menjadi era globalisasi.

Kenyataan ini merupakan kebijakan dan arah pembangunan yang diambil oleh negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, yang pada umumnya didominasi oleh model-model pemikiran ekonomi liberal kapitalistis gaya Amerika, intinya adalah maksimalisasi pemilikan materil dan optimalisasi kepuasan badaniah. Strategi pembangunan yang seperti ini akan menjadikan susunan masyarakat lama menjadi suatu lahan yang subur bagi penetrasi unsur-unsur baru budaya Barat. Padahal sudah diakui secara umum bahwa tidak ada ideologi dan strategi pembangunan ekonomi yang berlaku umum, masing-masing bangsa mempunyai visinya sendiri tentang bentuk masyarakat yang mereka cita-citakan, dan mempunyai cara sendiri untuk mencapai

tujuan tersebut, sesuai dengan budaya mereka (Marzali, 2005:198).

### Gejala Erosi Kultural

Dalam dasawarsa ini terdapat beragam sorotan dari pemimpin-pemimpin masyarakat tentang munculnya gejala-gejala perilaku sosial baru yang tidak sesuai dengan kultur bangsa, apabila hal ini dibiarkan terus berlarut akan dapat merusak nilai kultural bangsa Indonesia. Gejala-gejala yang mengkhawatirkan tersebut antara lain adalah kecenderungan kepada pola perilaku konsumerisme, nepotisme, sadistis, agresif, hipokrit, materialistis, individualistis, dan hedonistis. Secara umum, orang menyebut gejala tersebut sebagai proses penurunan nilai moral dan erosi kultural.

Sekarang mari kita lihat secara agak lebih terperinci gejala-gejala perilaku sosial baru yang disebutkan di atas. Gejala *pertama* adalah apa yang disebut *over consumptive* dan materialistis, yaitu satu gaya hidup dengan kebutuhan materi dan konsumsi makanan yang jauh berlebihan dari apa yang dibutuhkan dan pengembangan hobi yang memerlukan biaya sangat tinggi, seperti balap mobil, golf, kapal pesiar, dan berbelanja secara “gila-gilaan”. Ini adalah gaya hidup yang anti penghematan. Perilaku ini terutama diperlihatkan oleh sebagian kelas menengah dan kelas atas penduduk kota, termasuk pejabat pemerintah yang menduduki jabatan basah, yang kebetulan diuntungkan oleh hasil pembangunan ekonomi Indonesia (Marzali, 2005:198).

Contoh lain, kini cabang-cabang restoran *fastfood* yang berpusat di USA sudah banyak dibuka di kota-kota besar sampai ke kampong-kampung di Indonesia. Sebagian besar pengunjungnya adalah anak-anak muda kelas menengah kota. Alasan mereka mengunjungi restoran *fastfood* Amerika tersebut adalah lebih mencari gengsi daripada menikmati rasa makanannya. Mengunjungi restoran-restoran *fastfood*



seperti itu, misalnya Kentucky Fried Chicken, McDonald, Burger King, Pizza Hut adalah jauh lebih bergengsi di mata anak-anak muda kelas menengah tersebut daripada mengunjungi rumah-rumah makan domestik-tradisional.

Pola *over consumptive* dan materialistik ini sebagai pola perilaku masyarakat yang berada dalam transisi antara masyarakat petani pedesaan dan masyarakat industri perkotaan. Jika meminjam asumsi Benyamin Fisher (dalam Sumaatmadja, 1986:35), bahwa :

“dewasa ini Indonesia sedang meninggalkan tahap pra-industri menuju ke tahap transisi. Dengan demikian, Indonesia sedang meninggalkan tahap masyarakat tradisional, dan sedang menuju kearah pra-kondisi untuk tinggal-landas”.

Gejala *kedua* adalah perilaku sosial yang makin sadistik dan agresif yang terlihat dalam peristiwa-peristiwa seperti tawuran antar sekolah, pemalakan antar pelajar, perkelahian antar kampung, pembunuhan dengan alasan yang sangat sepele, perampokan yang disertai dengan pembunuhan, dan perkelahian antar suporter sepak bola.

Perkelahian antar sekolah di jalan-jalan dengan menggunakan lemparan batu telah menjadi menu mingguan di Jakarta. Seperti tawuran antar pelajar mulai dari tingkat SMP hingga SMA. Hal ini biasanya terjadi, seperti laporan dari media koran dan televisi, ketika para siswa telah lulus ujian nasional dan masalah sepele saling ejek antar sekolah. Hal yang sama juga dijumpai ketika melihat satu pertandingan sepak bola yang berakhir dengan keributan. Perkelahian dapat terjadi ditengah-tengah masa permainan, di mana batu dan botol minuman saling dilemparkan oleh pihak yang bermusuhan. Hal yang paling sering adalah apa yang disebut “*hooliganism*”, amukan penonton setelah keluar dari stadion sepak bola, yang

menghancurkan kaca-kaca mobil dan rumah-rumah yang dilewati, seperti yang pernah beberapa kali dilakukan oleh suporter fanatik.

Gejala *terakhir*, yaitu pola kehidupan hedonistik yang dikhawatirkan kecenderungan kepada pemuasan nafsu seks, nafsu makan, mabuk-mabukan, dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini terutama dilakukan oleh para remaja. Norma-norma tentang menahan diri dalam pemuasan nafsu badaniah sedang bergeser ke arah yang sebaliknya, dan ini adalah aspek yang paling dikecam sebagai pengaruh kebudayaan Barat.

Secara sepintas pola perilaku hedonistik ini dapat dihubungkan dengan pengaruh dari film-film Barat dan turis asing. Namun, seperti yang telah kita ketahui bahwa pengaruh dari luar hanyalah faktor sekunder. Faktor utama adalah perubahan sosiokultural sebagai akibat dari pembangunan ekonomi yang tidak berideologi. Saat ini prinsip dari pembangunan ekonomi Indonesia adalah maksimalisasi materi dan peningkatan kepuasan badaniah.

## Penutup

Sebagaimana sudah diungkapkan di atas, faktor awal dari gejala degradasi sosiokultural yang terjadi pada masyarakat Indonesia akhir-akhir ini adalah pembangunan ekonomi tanpa ideologi. Masyarakat Indonesia, yang mulanya adalah masyarakat pertanian pedesaan yang subsistem sedang bergerak masuk ke dalam transisi menuju ke masyarakat perkotaan dan industri yang komersial. Masa transisi ini, norma-norma lama mulai ditinggalkan sementara itu norma-norma baru belum terbentuk. Masyarakat berada dalam situasi yang tidak menentu.

Kemudian, kekuatan-kekuatan kultural semacam apakah yang perlu dibina oleh masyarakat Indonesia dalam rangka menanggulangi masalah-masalah di atas? Apakah kita perlu membendung atau menyaring pengaruh budaya asing yang

masuk melalui *global network*? Sementara di dalam negeri sendiri pemerintah menyediakan lahan yang subur bagi pertumbuhan pengaruh tersebut. Pembangunan ekonomi mendorong orang untuk menghargai dan mengadopsi pola perilaku dan nilai budaya Barat. Jadi, solusi yang ingin penulis sampaikan adalah tentang masalah-masalah penurunan moral dan erosi kultural seperti yang telah disampaikan, bukanlah pada penyekatan pengaruh Barat yang akhir-akhir ini merebak dengan ganas melalui *global network*, tetapi dengan cara merumuskan kembali strategi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia untuk saat ini dan masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Erani Yustika, Ahmad (ed.). 2006. *Perekonomian Indonesia Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan*. Malang: Bayu Media
- G. Lipsey, Richard & O. Steiner, Pete. 1991. *Pengantar Ilmu Ekonomi Edisi VI, Jilid I*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Diterjemahkan oleh Anas Sidik
- Lewis, W. Arthur. 1980. *Dasar-dasar Perencanaan Ekonomi Negara*. (Diterjemahkan oleh Drs. Moh. Radjab). Jakarta: Bhratara Karya Aksara
- Marzali, Amri. 2005. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Preneda Media
- Mubyarto, 1987. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES
- Mubyarto, "Beberapa Ciri dan Landasan Pikiran Sistem Ekonomi Pancasila," dalam, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Sri Edi Swasono (ed.), Jakarta : UI Press
- Ritzer, George. 2010. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Simon Adams. 2007. *Sejarah Dunia Dari Mesir Kuno Hingga Tsunami Asia*. (diterjemahkan oleh Damaring Tyas Wulandari, Hilda Kitty). Jakarta: Erlangga.
- Sudarsono, Juwono. 1995. *Politik, Ekonomi, Strategi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sumaatmadja, Nursid. 1986. *Perspektif Studi Sosial*. Bandung: Alumni

### Laporan Penelitian

- Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi UI. 1990. *Studi Kasus Manajemen KUD Setia Kawan*. Jakarta : LPM-UI

### Jurnal

- Emil Salim, "sistem ekonomi pancasila," *prisma*, No. 5 Mei 1979
- Peter McCawley, "The Economics of Ekonomi Pancasila," dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vo. XVIII, No. 1 March 1982